

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar penting dalam keuangan daerah yang menjadi penopang keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik. Untuk mengoptimalkan penerimaan PAD, pemerintah daerah diharuskan memaksimalkan potensi sumber-sumber pendapatan, termasuk retribusi. Di antara sumber PAD, retribusi jasa usaha menempati peran penting, terutama dalam sektor teknis yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, seperti layanan pengujian dan Standarisasi di laboratorium yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Salah satu unit yang relevan dalam konteks ini adalah UPTD Pengujian dan Standarisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat. UPTD Pengujian dan Standarisasi ini menyediakan layanan pengujian dan standarisasi material yang penting bagi keberlanjutan proyek infrastruktur, baik dari sektor publik maupun swasta. Seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat, permintaan terhadap layanan pengujian dan standarisasi material diperkirakan terus meningkat. Meskipun demikian potensi peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi jasa uji material belum termaksimalkan sepenuhnya. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan pendapatan Asli Daerah dari jasa

dan Standarisasi material tersebut, antara lain tarif retribusi,



jumlah layanan pengujian, dan efisiensi operasional. Tarif Retribusi yang diterapkan oleh UPTD untuk setiap layanan pengujian memainkan peran krusial dalam penentuan pendapatan Asli daerah. Penetapan tarif yang tepat harus mempertimbangkan beberapa aspek, seperti biaya operasional, nilai ekonomis layanan, daya beli konsumen, serta kebijakan daerah terkait tarif yang berlaku. Tarif retribusi yang terlalu rendah berpotensi mengurangi pendapatan, sementara tarif yang terlalu tinggi dapat menurunkan permintaan layanan. Oleh karena itu, analisis tarif retribusi yang optimal sangat diperlukan untuk menemukan keseimbangan yang mendukung pendapatan asli daerah. Jumlah Layanan Pengujian yang diberikan oleh laboratorium juga berhubungan langsung dengan pendapatan asli daerah yang dihasilkan. Semakin banyak layanan yang diberikan, semakin besar potensi penerimaan. Namun, jumlah layanan yang dapat diberikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kapasitas alat laboratorium, jumlah tenaga ahli yang tersedia, serta tingkat permintaan dari masyarakat atau dunia usaha. Penting untuk menganalisis bagaimana peningkatan jumlah layanan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, serta memahami hambatan apa saja yang mungkin menghalangi peningkatan jumlah layanan ini. Efisiensi Operasional menjadi faktor kunci yang mempengaruhi kinerja suatu unit layanan publik. Dalam konteks Pengujian dan standarisasi material, efisiensi Operasional dapat diukur melalui penggunaan sumber daya yang optimal, seperti tenaga kerja, peralatan,



aktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pengujian. Laboratorium yang beroperasi secara efisien dapat menghasilkan lebih

banyak layanan dengan biaya yang lebih rendah, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Namun, jika efisiensi rendah, meskipun tarif retribusi dan jumlah layanan meningkat, biaya yang tinggi bisa menggerus keuntungan yang seharusnya diperoleh. Berdasarkan uraian di atas sehingga penulis tertarik meneliti/ meninjau mengenai Pengaruh Tarif Retribusi, Jumlah Layanan Pengujian , dan Efisiensi Operasional terhadap Pendapatan Daerah di UPTD Pengujian dan Standarisasi Dinas PUPR Sulawesi Barat. Penelitian ini menjadi penting karena melalui pendekatan yang sistematis dan terukur, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang perlu diperbaiki dan strategi optimal yang dapat diterapkan oleh UPTD Pengujian dan standarisasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Urgensi Penelitian Penelitian ini mencoba untuk mengetahui apakah Tarif Retribusi, Jumlah Layanan Pengujian dan Efisiensi Operasional berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa retribusi daerah merupakan komponen penting dalam penerimaan Pendaptan Asli Daerah. Selain itu, peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi jasa pengujian ini dapat mengurangi ketergantungan daerah pada sumber pendanaan dari pusat dan mendorong otonomi keuangan daerah. Dengan analisis mendalam terhadap tarif Retribusi, jumlah layanan Pengujian dan efisiensi Operasional, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah



untuk meningkatkan kinerja UPTD Pengujian dan Standarisasi s memaksimalkan pendapatan Retribusi dari jasa Layanan

Pengujian dan Standarisasi. Relevansi Penelitian Penelitian ini relevan bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas PUPR dan badan pengelola keuangan daerah, untuk merumuskan strategi peningkatan PAD. Selain itu, penelitian ini juga relevan bagi pembuat kebijakan di tingkat lokal dalam pengambilan keputusan mengenai penyesuaian tarif retribusi, peningkatan kapasitas layanan, serta peningkatan efisiensi operasional guna mencapai target-target Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penting mengenai bagaimana ketiga variabel utama tarif retribusi, jumlah layanan pengujian, dan efisiensi operasional berperan dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan langkah apa yang dapat diambil untuk meningkatkan pendapatan dari sektor ini.

Hasil Penelitian Terdahulu tentang pengaruh tarif retribusi, jumlah layanan pengujian, dan efisiensi operasional terhadap pendapatan daerah atau sektor jasa telah menjadi fokus beberapa penelitian sebelumnya. Hasil-hasil ini memberikan landasan bagi penelitian yang akan dilakukan, terutama dalam konteks optimalisasi potensi pendapatan daerah. Pengaruh Tarif Retribusi terhadap Pendapatan Penelitian oleh Setiawan (2021) mengkaji pengaruh tarif retribusi terhadap pendapatan daerah di sektor layanan publik, khususnya pada UPTD kesehatan. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa tarif retribusi yang disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat dan biaya operasional memiliki pengaruh signifikan



› peningkatan pendapatan. Tarif yang optimal berperan dalam  
› keseimbangan antara biaya layanan dan jumlah pengguna jasa,

di mana penetapan tarif yang terlalu tinggi menyebabkan penurunan pelanggan, sementara tarif yang terlalu rendah tidak dapat menutupi biaya operasional secara efisien.

Simanjuntak (2019) juga meneliti pengaruh tarif retribusi terhadap pendapatan daerah di sektor layanan transportasi. Peneliti menemukan bahwa kenaikan tarif yang dilakukan tanpa memperhatikan daya beli masyarakat menyebabkan penurunan signifikan dalam jumlah pengguna, sehingga berdampak negatif pada pendapatan. Namun, ketika tarif disesuaikan secara bertahap berdasarkan tingkat inflasi dan biaya operasional, pendapatan daerah mengalami peningkatan yang signifikan.

Suryana (2020) Pengaruh Jumlah Layanan terhadap Pendapatan dalam penelitiannya tentang sektor jasa uji teknis di laboratorium daerah menemukan bahwa peningkatan jumlah layanan memiliki korelasi langsung dengan peningkatan pendapatan daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa layanan yang berkelanjutan dan terpadu dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap jasa pengujian material merupakan faktor penting dalam meningkatkan penerimaan retribusi. Suryana juga menekankan bahwa ketersediaan infrastruktur pendukung, seperti alat-alat pengujian yang canggih, serta kemampuan tenaga kerja, menjadi aspek penting yang mempengaruhi jumlah layanan yang diberikan.

Yuliana (2022) melakukan penelitian di sektor kesehatan, di mana ia mengkaji jumlah layanan yang diberikan oleh laboratorium kesehatan dan

nya terhadap pendapatan retribusi. Hasil penelitiannya  
lkan bahwa peningkatan jumlah layanan yang berkualitas, diiringi



dengan pelayanan cepat dan efisien, secara signifikan meningkatkan pendapatan retribusi. Penelitian ini menyoroti pentingnya kualitas layanan dalam mempengaruhi minat pengguna jasa laboratorium.

Haryanto (2018) Pengaruh Efisiensi Operasional terhadap Pendapatan meneliti efisiensi operasional di sektor publik dan dampaknya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa peningkatan efisiensi operasional, yang diukur melalui kecepatan layanan, pemanfaatan sumber daya yang optimal, serta pengurangan biaya operasional yang tidak perlu, dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. Haryanto juga menemukan bahwa penerapan teknologi dan pelatihan berkelanjutan bagi staf dapat meningkatkan efisiensi operasional laboratorium.

Rahmawati (2021) dalam studi yang berfokus pada efisiensi operasional di laboratorium lingkungan daerah menemukan bahwa laboratorium yang berhasil menerapkan sistem operasional yang efisien, seperti penjadwalan uji yang tepat waktu dan penggunaan teknologi modern, mampu meningkatkan output layanan. Ini berdampak langsung pada peningkatan jumlah layanan pengujian dan, pada akhirnya, pendapatan daerah. Penelitian ini menekankan bahwa efisiensi operasional tidak hanya terkait dengan manajemen waktu, tetapi juga penggunaan sumber daya manusia dan peralatan yang efektif.

Pengaruh Kombinasi Variabel Terhadap Pendapatan Daerah



in oleh Pratama (2020) menunjukkan bahwa kombinasi antara tarif retribusi, jumlah layanan, dan efisiensi operasional dapat

memberikan dampak yang sinergis terhadap peningkatan pendapatan daerah. Dalam studi kasus pada sektor transportasi publik, ditemukan bahwa ketika ketiga faktor tersebut ditingkatkan secara bersamaan, pendapatan daerah meningkat hingga 20%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh masing-masing faktor tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait.

Studi Dewi dan Putra (2021) juga mendukung temuan ini, di mana mereka menemukan bahwa upaya untuk meningkatkan tarif retribusi harus diimbangi dengan peningkatan jumlah layanan serta efisiensi operasional. Jika salah satu faktor diabaikan, maka peningkatan pendapatan tidak akan maksimal. Dalam penelitiannya, mereka menyarankan agar pemerintah daerah lebih memperhatikan sinkronisasi kebijakan tarif, peningkatan kualitas layanan, dan efisiensi operasional agar dapat memaksimalkan potensi pendapatan daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Pratama, Dwi dan Putra Mintarsih(2020-2021), perbedaan penelitian ini yang dilakukan Pratama terletak pada objek penelitiannya, penelitian ini mengambil objek Transportasi Publik, Pengaruh Kombinasi Variabel Terhadap Pendapatan Daerah. sedangkan penelitian Dwi dan Putra (2021) Mengambil sinkronisasi kebijakan tarif, peningkatan kualitas layanan, dan efisiensi operasional . Alasan mengambil objek di Uptd Pengujian Dan Standarisasi adalah peneliti memilih UPTD Pengujian dan Standarisasi dinas PUPR di Provinsi Sulawesi Barat untuk dijadikan objek penelitian



ingin mengetahui seberapa berpengaruh penelitian tersebut  
ai Tarif Harga, Jumlah Layanan Pengujian dan Efisiensi

Operasional terdiri dari 2 data Pendapatan Asli Daerah dan Periode penelitian 10 tahun terakhir, dan masing-masing memiliki pendapatan yang berbeda.

Tabel 1.1  
Research Gap

Penelitian Terdahulu	Judul Pajak Daerah	Variabel Independen			Variabel dependen (y)
		Tarif Retribusi	Jumlah Layanan	Efesiensi Operasional.	
Setiawan (2021)	pengaruh tarif retribusi terhadap pendapatan daerah di sektor layanan publik, khususnya pada UPTD Kesehatan	B			Pendapatan Daerah.
Simanjuntak (2019)	Pengaruh tarif retribusi terhadap pendapatan daerah di sektor layanan transportasi.	B			Pendapatan Daerah
Suryana (2020)	Pengaruh Jumlah Layanan terhadap Pendapatan.		B		Pendapatan Daerah.
Yuliana (2022)	Jumlah layanan yang diberikan oleh laboratorium kesehatan dan dampaknya terhadap pendapatan retribusi		B		pendapatan retribusi.
Haryanto (2018)	Pengaruh Efisiensi Operasional terhadap Pendapatan.			B	Pendapatan Daerah.
Pratama (2020)	Pengaruh Kombinasi Variabel Terhadap Pendapatan Daerah	B	B	B	Pendapatan Daerah. Transportasi Publik.
Dewi dan Putra (2021)	sinkronisasi kebijakan tarif, peningkatan kualitas layanan, dan efisiensi operasional	B	B	B	Pendapatan Daerah.



terangan :

: Berpengaruh.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka penulis tertarik mengadakan penelitian tesis dengan judul : “ **Pengaruh Tarif Retribusi, Jumlah Layanan Pengujian , dan Efisiensi Operasional terhadap Pendapatan Asli Daerah di UPTD Pengujian dan Standarisasi Dinas PUPR Sulawesi Barat**”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah tarif retribusi Berpengaruh terhadap pendapatan daerah Uptd Pengujian dan Standarisasi?
2. Apakah jumlah layanan pengujian Berpengaruh Terhadap pendapatan daerah Uptd Pengujian dan Standarisasi?
3. Apakah efisiensi operasional Berpengaruh terhadap pendapatan daerah Uptd Pengujian dan Standarisasi?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Bertolak pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh tarif retribusi terhadap pendapatan daerah UPTD Pengujian dan Standarisasi.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah layanan pengujian terhadap pendapatan daerah UPTD Pengujian dan Standarisasi.
3. Mengetahui dan Menganalisis pengaruh efisiensi operasional terhadap pendapatan daerah Uptd Pengujian dan Standarisasi.



## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memperkaya literatur terkait pengelolaan retribusi jasa usaha, terutama dalam kaitannya dengan sektor pengujian material dan standarisasi.

### **1.4.3 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas PUPR Sulawesi Barat, dalam mengoptimalkan pendapatan dari retribusi jasa uji material melalui penyesuaian tarif, peningkatan jumlah layanan, serta efisiensi operasional.

**1.4.4 Manfaat Peneliti:** Penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai pengaruh tarif retribusi, jumlah layanan pengujian, dan efisiensi operasional terhadap pendapatan asli daerah di UPTD pengujian dan standarisasi dinas PUPR Sulawesi Barat.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap isi dari penelitian ini, maka penulisan ini dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut:



## **Bab I Pendahuluan,**

Berisi bagaimana latar belakang masalah yang terjadi sehingga diangkat menjadi objek penelitian. Dari latar belakang masalah tersebut dirumuskan suatu permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat dari penelitian serta sistematika penulisan.

## **Bab II Tinjauan Pustaka,**

Membahas tentang landasan teori yang mendukung perumusan hipotesis dalam menganalisis hasil penelitian - penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan juga hipotesis sebagai pernyataan akurat yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti.

## **Bab III Kerangka Konseptual Dan Hipotesis Penelitian,**

Bab ini menguraikan hipotesis penelitian yang dibangun berdasarkan landasan kerangka konseptual.

## **Bab IV Metode Penelitian,**

Membahas variabel penelitian, definisi optimal yang dapat memberikan deskripsi tentang variable-variabel yang dapat digunakan dalam penelitian. jenis dan sumber data mendeskripsikan tentang jenis data dari variabel penelitian serta darimana data tersebut diperoleh, metode pengumpulan data dan menjelaskan prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, metode analisis yang berisi instrument penelitian yang digunakan dalam melakukan pengujian hipotesis.



↓↓

**Bab V Hasil Penelitian,**

Mendesripsikan obyek penelitian dan menyajikan data - data deskripsi hasil analisis statistik yang telah dilakukan.

**Bab VI Pembahasan,**

Membahas hasil - hasil penelitian yang telah diteliti.

**Bab VII penutup,**

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori Dan Konsep**

##### **2.1.1 Teori dan Konsep Pendapatan Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Rukmana (2020) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.” Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sector pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Puja Rizqi, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam Andi dan Revoldai (2020) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.” Menurut Yani (2008 : 51) dalam Endra Gunawan (2018) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah dalam menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asa desentralisasi.





### 2.1.2 Konsep Retribusi

Sebagai sumber yang cukup penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah retribusi. Retribusi menempati urutan kedua setelah pajak, oleh karena itu perannya sangat penting bagi pemerintah di daerah. Upaya peningkatan kinerja pemungutan serta pemberian kekuasaan bagi daerah untuk menggali sumber – sumber penerimaan khususnya retribusi daerah. Retribusi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan dari daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khususnya di sediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

### 2.1.3 Defenisi Retribusi

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Ahmad Yani (2002:55). Daerah provinsi, kabupaten kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber daya keuangan dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi criteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Menurut Marihot P. Siahaan ( 2005:6 ), Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah





berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang , fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, ingin menikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **2.1.4 Jenis Retribusi**

Jenis – Jenis Retribusi Daerah Retribusi daerah menurut Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru disatu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta data dinikmati oleh orang pribadi atau badan,  
Retribusi Jasa Usaha pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh



pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan,

- c. Retribusi Perizinan Tertentu pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

### **2.1.5 Regulasi Retribusi Jasa Usaha**

1. Peraturan daerah provinsi sulawesi barat nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi sulawesi barat nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha.
2. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Tarif Jasa Usaha.
3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sekaligus sebagai rujukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penelitian tentang Pengaruh Tarif Retribusi terhadap Pendapatan Daerah Beberapa penelitian telah mengkaji hubungan antara tarif retribusi dan pendapatan daerah. Simanjuntak (2019), dalam penelitiannya tentang pengaruh kebijakan tarif terhadap penerimaan retribusi di sektor transportasi publik, menunjukkan bahwa penetapan tarif yang rasional dan terukur dapat meningkatkan pendapatan daerah tanpa menurunkan permintaan layanan.



Penelitian ini menemukan bahwa tarif yang sesuai dengan daya beli masyarakat akan meningkatkan partisipasi pengguna dan memberikan dampak positif terhadap pendapatan.

Penelitian serupa oleh Setiawan (2020) di sektor kesehatan menunjukkan bahwa peningkatan tarif retribusi, apabila diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan, dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Setiawan juga menekankan pentingnya fleksibilitas tarif yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi lokal, di mana tarif yang terlalu tinggi justru akan mengurangi pendapatan akibat penurunan jumlah layanan yang digunakan.

Temuan dari penelitian ini relevan untuk konteks UPTD Pengujian dan Standarisasi karena pengaturan tarif pengujian material harus memperhatikan daya beli pelanggan, yang sebagian besar adalah entitas swasta maupun publik yang membutuhkan layanan pengujian. Penyesuaian tarif yang tidak proporsional dapat berdampak pada permintaan layanan, yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan retribusi.

Penelitian tentang Pengaruh Jumlah Layanan terhadap Pendapatan Daerah.

Suryana (2020) dalam penelitiannya tentang pengaruh jumlah layanan terhadap pendapatan retribusi pada laboratorium pengujian

knis menemukan bahwa semakin banyak layanan yang diberikan, semakin besar pula potensi pendapatan yang dapat diperoleh.





Penelitian ini menekankan pentingnya penyediaan layanan yang berkualitas dan tepat waktu agar dapat menarik lebih banyak pengguna jasa, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan.

Rahmadani (2021), dalam penelitiannya di sektor laboratorium kesehatan, menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas layanan laboratorium dalam menangani permintaan pengujian material secara efisien mampu meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. Ia mencatat bahwa laboratorium yang mampu menyediakan berbagai jenis pengujian dengan waktu yang lebih cepat dan hasil yang lebih akurat cenderung mendapatkan lebih banyak pelanggan dan meningkatkan jumlah layanan yang diberikan.

Penelitian-penelitian ini sangat relevan dengan konteks UPTD Pengujian dan Standarisasi di Sulawesi Barat, di mana peningkatan jumlah layanan pengujian material sangat dipengaruhi oleh kapasitas laboratorium dalam menyediakan pengujian yang bervariasi dan cepat. Jika jumlah layanan yang diberikan meningkat, maka potensi peningkatan pendapatan juga akan semakin besar. Penelitian tentang Pengaruh Efisiensi Operasional terhadap Pendapatan Daerah.

Penelitian oleh Haryanto (2018) di sektor transportasi publik menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi operasional, seperti pengurangan biaya operasional yang tidak perlu dan optimalisasi





sumber daya manusia, dapat meningkatkan margin pendapatan secara signifikan. Haryanto juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, terutama dalam konteks layanan publik.

Dalam penelitian lain oleh Wibowo (2021), yang fokus pada efisiensi operasional di laboratorium lingkungan, ditemukan bahwa laboratorium yang menerapkan teknologi modern serta manajemen yang efektif dalam mengelola sumber daya manusia mampu meningkatkan efisiensi proses operasional. Hasilnya, laboratorium tersebut mampu mengurangi biaya operasional dan mempercepat proses pengujian, sehingga meningkatkan jumlah layanan yang dapat diberikan dan pendapatan dari retribusi.

Temuan ini sejalan dengan tujuan penelitian ini, di mana efisiensi operasional di laboratorium pengujian material UPTD akan berdampak pada peningkatan kapasitas layanan serta penurunan biaya operasional, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan daerah. Penerapan teknologi dan sistem manajemen yang baik akan mempercepat proses pengujian dan meningkatkan jumlah layanan, sehingga memperbesar potensi pendapatan.

Kombinasi Pengaruh Tarif, Jumlah Layanan, dan Efisiensi Operasional terhadap Pendapatan Daerah.

Pratama (2020) meneliti bagaimana tarif Retribusi, jumlah layanan,

an efisiensi operasional secara bersama-sama mempengaruhi pendapatan daerah di sektor pengujian laboratorium





teknik sipil. Ia menemukan bahwa ketika tarif retribusi ditetapkan pada tingkat yang tepat, jumlah layanan yang ditawarkan laboratorium meningkat, dan proses operasional dijalankan secara efisien, maka pendapatan dari retribusi dapat meningkat secara signifikan. Penelitian ini menyarankan agar pengelola laboratorium memperhatikan ketiga faktor ini secara simultan, bukan hanya berfokus pada satu aspek saja.

Dewi (2021) juga menemukan bahwa upaya peningkatan pendapatan daerah harus mempertimbangkan sinkronisasi antara tarif retribusi, jumlah layanan, dan efisiensi operasional. Dewi menyatakan bahwa meskipun tarif yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan dalam jangka pendek, namun tanpa peningkatan kualitas dan jumlah layanan serta efisiensi operasional, pendapatan tidak akan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Relevansi Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini memberikan bukti empiris bahwa ketiga variabel, yaitu tarif retribusi, jumlah layanan, dan efisiensi operasional, memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah di berbagai sektor. Penelitian ini akan mengembangkan temuan-temuan tersebut dalam konteks UPTD Pengujian dan Standarisasi Dinas PUPR Sulawesi Barat, di mana laboratorium pengujian material memainkan peran penting dalam menghasilkan pendapatan daerah (PAD) melalui retribusi

asa Layanan. Dengan mempertimbangkan hasil penelitian terdahulu,





penelitian ini diharapkan dapat memberikan temuan yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara variabel-variabel tersebut.

